



Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo

POLICY BRIEF

INDEKS

GOOD

GOVERNANCE

KABUPATEN SIDOARJO

2 0 2 1



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sidoarjo

INDEKS *GOOD GOVERNANCE* KABUPATEN SIDOARJO 2021

LATAR BELAKANG

Terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan komitmen Pemerintah Pusat akan system desentralisasi kebijakan atau otonomi daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Indeks *Good Governance* (IGG) dalam hal ini berposisi sebagai tolok ukur yang dipakai oleh Pemerintah Pusat dalam mengukur tingkat kualitas kelembagaan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan, pemberdayaan, dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo turut berkomitmen dalam terciptanya Lembaga Pemerintahan yang baik, responsive, transparan, dan akuntabel sehingga menjadikan Indeks *Good Governance* (IGG) sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2016-2021.

Pencapaian Indeks *Good Governance* (IGG) Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 terus mengalami perbaikan, bahkan cenderung berada di atas target yang ditentukan. Capaian Indeks *Good Governance* (IGG) tahun 2020 sebesar 77,78 melebihi target yang ditentukan yaitu 69,55. Untuk mengetahui perkembangan Indeks *Good Governance* (IGG) tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui melakukan pengukuran Indeks *Good Governance* (IGG) dengan melibatkan seluruh *stakeholders* Pembangunan Daerah.

TUJUAN PENELITIAN

- a. Menganalisa capaian Indeks Good Governance Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021;
- b. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Good Governance Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021;

- c. Merumuskan strategi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya mempertahankan bahkan meningkatkan Indeks Good Governance Kabupaten Sidoarjo.

METODOLOGI DAN DATA

Untuk mencapai tujuan di atas, metode yang digunakan dalam riset ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data yang bersumber pada buku-buku, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian;
- b. Studi lapangan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan menyeleksi data yang diperoleh di lokasi penelitian;
- c. *Interview* (wawancara), adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Sebaran Populasi sampel dalam penyusunan *Indeks Good Governance* Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 ini adalah jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dengan rentang usia 15 tahun hingga 64 tahun (usia produktif) yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, NGO, dan Pelaku Usaha.

PEMBAHASAN

Indeks *Good Governance* Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 ditargetkan sebesar 70,76. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, nilai Indeks *Good Governance* Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 sebesar 80.39 dengan kategori sangat baik. Indeks *Good Governance* Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, yaitu sebesar 77,78 atau naik sebesar 2,61 poin.

| No | Uraian | Nilai |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Prinsip Taat Hukum | 82.63 |
| 2 | Prinsip Partisipasi | 78.06 |
| 3 | Prinsip Transparansi | 79.19 |
| 4 | Prinsip Akuntabilitas | 79.90 |
| 5 | Prinsip Daya Tanggap | 80.00 |
| 6 | Prinsip Kesetaraan/Keadilan | 80.69 |
| 7 | Prinsip Efektifitas/Efisiensi | 78.81 |
| 8 | Prinsip Visi Strategis | 83.81 |
| Indeks Good Governance | | 80.39 |

Sumber: Hasil Survei Indeks Good Governance 2021, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dari 8 (delapan) prinsip yang diukur, prinsip visi strategis merupakan komposit dengan penilaian tertinggi yaitu 87,31. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Daerah bersama jajaran pemerintahannya memiliki komitmen yang tinggi terhadap arah pembangunan daerah ke depan. Visi misi Kepala Daerah dinilai oleh masyarakat telah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo dan merupakan solusi atas permasalahan pembangunan yang selama ini terjadi. Salah satu program prioritas Kepala Daerah yang dianggap mulai terwujud adalah perbaikan di bidang infrastruktur dan normalisasi sungai.

Penilaian tertinggi kedua ditempati oleh prinsip taat hukum. Nilai indeks prinsip taat hukum sebesar 82,63. Berdasarkan hasil wawancara lapangan, salah satu factor yang mempengaruhi tingginya indeks prinsip taat hukum adalah kecilnya angka pelanggaran terhadap peraturan daerah oleh masyarakat dan ketegasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menindak para pelanggar ketertiban umum, salah satunya Tindakan tegas dalam hal ketertiban berkerumun di masa Pandemi *Covid-19*. Sementara itu pada prinsip lainnya capaian indeksnya cukup merata yaitu pada nilai indeks dengan rentang nilai 78 sampai 80.

Indeks *Good Governance* Perspektif Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan menurut responden yang berasal dari Perangkat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 dinilai sudah sangat baik. Hasil survey menyatakan bahwa Indeks *Good Governance* perspektif Pemerintah sebesar 87,32.

| No | Uraian | Nilai |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Prinsip Taat Hukum | 87,86 |
| 2 | Prinsip Partisipasi | 87,19 |
| 3 | Prinsip Transparansi | 87,20 |
| 4 | Prinsip Akuntabilitas | 88,18 |
| 5 | Prinsip Daya Tanggap | 87,24 |
| 6 | Prinsip Kesetaraan/Keadilan | 87,47 |
| 7 | Prinsip Efektifitas/Efisiensi | 86,88 |
| 8 | Prinsip Visi Strategis | 86,56 |
| Indeks Good Governance | | 87,32 |

Sumber: Hasil Survei Indeks *Good Governance* 2021, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa prinsip Akuntabilitas merupakan prinsip dengan nilai paling tinggi yaitu 88,18. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah menilai sudah menggunakan segenap sumberdaya yang dimiliki untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat, baik sumberdaya anggaran maupun kinerja aparaturnya. Sedangkan prinsip lainnya nilai indeksnya merata di kisaran angka 86 - 87.

Indeks *Good Governance* Perspektif Masyarakat

Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk terwujudnya mekanisme *check and balances* arah pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu masyarakat sebagai objek pembangunan, secara langsung juga akan menilai kinerja Pemerintah Daerah melalui pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, kondisi tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo perlu diketahui berdasarkan sudut pandang masyarakat.

Berdasarkan hasil survei dan analisis berikut adalah Indeks *Good Governance* Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 pada dimensi masyarakat adalah sebesar 81,99.

| No | Uraian | Nilai |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Prinsip Taat Hukum | 86,58 |
| 2 | Prinsip Partisipasi | 79,12 |
| 3 | Prinsip Transparansi | 81,31 |
| 4 | Prinsip Akuntabilitas | 80,55 |
| 5 | Prinsip Daya Tanggap | 80,87 |
| 6 | Prinsip Kesetaraan/Keadilan | 82,43 |
| 7 | Prinsip Efektifitas/Efisiensi | 79,45 |
| 8 | Prinsip Visi Strategis | 85,63 |
| IGG Dimensi Masyarakat | | 81,99 |

Table di atas menunjukkan bahwa prinsip taat hukum merupakan dimensi dengan nilai paling tinggi yaitu 86.58 dan diikuti dengan prinsip visi strategis dan kesetaraan dengan masing-masing indeks sebesar 85.63 dan 82.43. Hal ini menunjukkan fakta bahwa masyarakat menilai Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berhasil menjaga ketertiban umum di masyarakat melalui ketaatan pada supremasi hukum. Selain itu masyarakat juga menilai bahwa strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sidoarjo sudah berada pada jalur yang positif dan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Namun masyarakat masih merasa belum sepenuhnya terlibat dalam proses perumusan sebuah kebijakan di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini terlihat dari nilai indeks prinsip partisipasi yang capaian paling rendah yaitu sebesar 79.12. Capaian tersebut secara kategori sudah baik, tetapi apabila pada prinsip partisipasi masyarakat semakin tinggi maka tata kelola Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo semakin baik.

Indeks *Good Governance* Perspektif NGO dan Pelaku Usaha

Indeks *Good Governance* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 menurut *Non-Government Organization* (NGO) yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan, dan Organisasi Kepemudaan serta pelaku usaha dinilai sudah sangat baik dengan nilai indeks sebesar 80,17.

| No | Uraian | Nilai |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Prinsip Taat Hukum | 79,13 |
| 2 | Prinsip Partisipasi | 80,67 |
| 3 | Prinsip Transparansi | 79,88 |
| 4 | Prinsip Akuntabilitas | 83,82 |
| 5 | Prinsip Daya Tanggap | 79,88 |
| 6 | Prinsip Kesetaraan/Keadilan | 78,61 |
| 7 | Prinsip Efektifitas/Efisiensi | 79,42 |
| 8 | Prinsip Visi Strategis | 79,94 |
| Indeks Good Governance | | 80,17 |

Table di atas menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas mendapatkan penilaian tertinggi dari responden yaitu 83,82, artinya para tokoh LSM, Ormas, maupun Kepemudaan serta pelaku usaha menilai Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berhasil mengelola sumberdaya anggaran yang dimiliki untuk kebermanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Salah satu isu yang banyak dijadikan sebagai indikator untuk menyatakan akuntabilitas Pemerintah Daerah adalah adanya perbaikan infrastruktur jalan dan percepatan vaksin *Covid-19* di. Sementara itu capaian untuk prinsip lainnya secara konsisten berada pada angka indeks 79 sampai 80.

KESIMPULAN

1. Capaian Indeks *Good Governance* di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 sebesar 80,39 dengan termasuk kategori sangat baik. Nilai tersebut naik sebesar 2,61 poin atau sekitar 3% persen dari tahun sebelumnya. Prinsip dengan indeks tertinggi adalah Prinsip visi strategis dengan nilai

- sebesar 87,31 sedangkan yang paling rendah adalah Prinsip Partisipasi yakni dengan nilai 78,06.
2. Capaian Indeks *Good Governance* perspektif pemerintah di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 sebesar 87,32. Prinsip dengan nilai paling tinggi adalah Prinsip Partisipatif dan yang paling rendah adalah Prinsip Taat Hukum.
 3. Capaian indeks *Good Governance* perspektif masyarakat di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 sebesar 81,99. Prinsip dengan indeks tertinggi adalah Prinsip Taat Hukum dan yang paling rendah adalah Prinsip Daya Tanggap.
 4. Capaian indeks *Good Governance* perspektif NGO/Pelaku Usaha di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 sebesar 80,17. Prinsip dengan indeks tertinggi adalah Prinsip Akuntabilitas dan yang paling rendah adalah Prinsip Taat Hukum.
 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks *Good Governance* di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 adalah hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat dalam segala bentuk kerjasama seluruh program, tentunya di lain sisi daya dukung SDM yang baik dari seluruh jajaran birokrasi di pemerintahan sidoarjo menjadi pengaruh besar dalam terwujudnya Good Governance di kabupaten sidoarjo.
 6. Jika dilihat perkembangan Indeks Good Governance dari beberapa tahun sebelumnya mengalami trend yang cukup baik, artinya secara garis besar selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sehingga dapat di simpulkan bahwa secara sudut pandang masyarakat terhadap tatakelola pemerintah kabupaten sidoarjo, dari tahun ke tahun semakin baik.

REKOMENDASI

1. Perangkat Daerah harus lebih maksimal dalam memberikan sosialisasi terhadap seluruh program-program pemerintah kepada masyarakat, maka langka publikasi harus di maksimalkan secara intensif sehingga masyarakat mampu melihat setiap kinerja yang telah dilakukan pemerintah terutama kepada stakeholder di seluruh wilayah kecamatan dan desa.

2. Pemerintah Daerah harus mampu merangkul kelompok-kelompok kerja masyarakat guna menjadi media patner pelaksanaan program -program yang ada seperti; NGO, Komunitas, ataupun kelompok pelaku usaha.
3. Untuk meningkatkan Indeks *Good Governance* dimensi NGO dan Pelaku Usaha, Pemerintah Daerah hendaknya Pemerintah Daerah mereformasi system pelayanan perijinan usaha dan memberikan jaminan hukum berupa supremasi hukum (*the supremacy of law*), kepastian hukum (*legal certainty*), hukum yang responsif, dan penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif bagi pelaku usaha (UMKM).
4. Untuk meningkatkan Indeks *Good Governance* dimensi Masyarakat, Pemerintah Daerah hendaknya meningkatkan lagi pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan perumusan kebijakan daerah sejak tingkat desa hingga kabupaten, baik penyusunan perencanaan pembangunan daerah maupun kebijakan lainnya.